



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg>

INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SAMPAH MELALUI PROGRAM RESIK-RESIK PILAH SAMPAH KOTA SURAKARTA (RESPATA)

Hendra Wijayanto

Administrasi Publik, UPN Jawa Timur

hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 25 September 2024

Revised date: 14 November 2024

Accepted date: 25 November 2024

The Resik-Resik Pilah Sampah Kota Surakarta (Respata) program is a policy innovation by the Surakarta City Government as an adaptive response to the waste management crisis and TPA (Final Disposal Site) limitations. This research analyzes Respata using the Dynamic Governance framework, which emphasizes the government's capabilities for adaptation, innovation, and learning. A qualitative method was employed through policy and implementation document analysis, focusing on the three pillars of Dynamic Governance. The results show that Respata fundamentally reflects Dynamic Governance. The Thinking Ahead pillar is realized in the strategic vision of securing the TPA's lifespan and integrating the supply of clean waste with the Waste-to-Energy Plant (PLTSa), supported by predictive regulations (mandatory sorting). The Thinking Again pillar is achieved through radical correction, replacing voluntary mechanisms (3R) with consequential enforcement mechanisms, and prioritizing the handling of organic waste. The most innovative aspect is the Thinking Across pillar, where the program adopts a Pentahelix collaboration model involving the TNI (Babinsa) and Polri (Bhabinkamtibmas). The involvement of security forces creates a multiplier effect to ensure discipline and uniform implementation reach across the entire region, overcoming the limitations of the Environmental Agency's (DLH) human resources. In conclusion, Respata is a Dynamic Governance model that successfully transforms waste management through visionary strategies and innovative institutional synergy.

Keywords: Waste, Respata, Surakarta, Dynamic Governance.

ABSTRAKSI

Program Resik-Resik Pilah Sampah Kota Surakarta (Respata) adalah inovasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta sebagai respons adaptif terhadap krisis pengelolaan sampah dan keterbatasan TPA. Penelitian ini menganalisis Respata menggunakan kerangka Dynamic Governance yang menekankan kapabilitas pemerintah untuk beradaptasi, berinovasi, dan belajar. Metode kualitatif digunakan melalui analisis dokumen kebijakan dan implementasi, berfokus pada tiga pilar *Dynamic Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Respata secara fundamental mencerminkan *Dynamic Governance*. Pilar *Thinking Ahead* terwujud dalam visi strategis mengamankan usia TPA dan mengintegrasikan pasokan sampah bersih dengan PLTSa, didukung regulasi prediktif (pemilahan wajib). Pilar *Thinking Again* dicapai melalui koreksi radikal, mengganti mekanisme sukarela (3R) menjadi mekanisme penegakan yang berkonsekuensi, serta mengutamakan penanganan sampah organik. Yang paling inovatif adalah Pilar *Thinking Across*, di mana program ini mengadopsi model kolaborasi Pentaheliks yang melibatkan TNI (Babinsa) dan Polri (Bhabinkamtibmas). Keterlibatan aparat keamanan ini menciptakan *multiplier effect* untuk menjamin disiplin dan jangkauan implementasi yang seragam di seluruh wilayah, mengatasi keterbatasan SDM DLH. Kesimpulannya, Respata adalah model *Dynamic Governance* yang berhasil mentransformasi tata kelola sampah melalui strategi visioner dan sinergi kelembagaan yang inovatif.

Kata Kunci : Sampah, Respata, Surakarta, *Dynamic Governance*.

Pendahuluan

Persoalan sampah di Indonesia merupakan isu strategis nasional yang memerlukan penanganan segera dan komprehensif. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghasilkan limbah nonorganik, volume timbulan sampah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023) menunjukkan bahwa total produksi sampah nasional mencapai sekitar 68 juta ton per tahun, dengan rata-rata timbulan sampah sebesar 0,68 kilogram per orang per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 60–70% berasal dari sampah rumah tangga, sementara sisanya berasal dari kegiatan pasar, perkantoran, industri kecil, dan fasilitas publik.

Permasalahan sampah perkotaan di Indonesia, termasuk di Kota Surakarta, telah mencapai tahap yang memerlukan intervensi inovatif dan kolaboratif. Peningkatan jumlah penduduk dan intensitas aktivitas ekonomi secara langsung berkorelasi dengan peningkatan volume timbulan sampah harian. Data menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan di Kota Surakarta mencapai kisaran 250 hingga 300 ton setiap harinya, dengan dominasi sampah organik dan plastik (Lihat, misalnya, Indarmawan & Amin, 2020; KLHK, 2019).

Secara historis, sistem pengelolaan sampah di Kota Surakarta masih didominasi oleh pendekatan tradisional, yakni sistem kumpul, angkut, dan buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo. Sistem ini, bahkan pernah menggunakan metode *open dumping* yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan modern, yang pada akhirnya memicu masalah lingkungan serius dan menjadi indikator buruk dalam penilaian kebersihan kota (Suriyanti, 2021). Sistem ini dianggap tidak efektif karena tidak menyelesaikan akar permasalahan di tingkat

sumber, yakni rumah tangga dan pelaku usaha. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah menjadi dasar lahirnya berbagai inovasi berbasis partisipasi publik di Kota Surakarta.

Ketergantungan pada TPA sebagai solusi akhir menimbulkan tekanan besar, terutama mengingat keterbatasan lahan dan upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk menerapkan konsep *zero waste* dan *Circular Economy* (Ekonomi Sirkular) sebagai arah kebijakan jangka panjang (Supratikno, 2023; Jurnal Bengawan Solo, 2024). Untuk mencapai tujuan tersebut, kunci utama yang teridentifikasi adalah reduksi sampah dari sumber dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Sejumlah penelitian menyoroti bahwa walaupun regulasi pengelolaan sampah di Surakarta sudah ada, implementasinya, khususnya dalam aspek pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, namun masih belum optimal (Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 2021). Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum maksimalnya sosialisasi program pilah sampah, menjadi faktor penghambat signifikan dalam upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA (Supratikno, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu secara konsisten menyoroti kegagalan sistem pengelolaan sampah konvensional di Kota Surakarta sebagai latar belakang fundamental yang memicu kebutuhan akan inovasi seperti *Respa*. Tinjauan studi ini umumnya berfokus pada volume sampah yang masif dan ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Misalnya, penelitian oleh Indarmawan & Amin (2020) menyoroti bahwa timbulan sampah harian di Surakarta yang mencapai ratusan ton menempatkan beban operasional yang tidak

berkelanjutan pada TPA Putri Cempo. Studi ini, meskipun fokus pada peran pemulung, secara implisit menggarisbawahi urgensi pengurangan sampah dari sumber. Lebih lanjut, analisis yang dilakukan oleh Suriyanti (2021) secara eksplisit mengkritik sistem pengelolaan sampah lama yang masih menganut konsep *kumpul, angkut, dan buang*, bahkan sempat menggunakan praktik *open dumping*. Menurut Suriyanti (2021), model tradisional ini tidak memadai untuk mewujudkan visi *zero waste*, menunjukkan adanya disfungsi antara regulasi daerah yang mengamankan pengurangan sampah dengan implementasi di lapangan.

Menyikapi urgensi tersebut, Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan Program Resik-Resik Pilah Sampah Kota Surakarta (Respata) sebagai inovasi strategis. Program ini diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai upaya konkret dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Respata menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber, dengan melibatkan berbagai pihak. Program ini secara fundamental bergeser dari fokus penanganan di hilir (TPA) ke upaya pemilahan dan pengurangan di hulu atau sumbernya, yaitu rumah tangga. Respata menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI (melalui Babinsa), Polri (melalui Bhabinkamtibmas), serta seluruh elemen masyarakat dan komunitas (RBTv, 2025).

Melalui Respata, Pemerintah Kota Surakarta berupaya mengubah paradigma masyarakat dari membuang menjadi memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah (organik, anorganik, residu), didukung fasilitas dan edukasi berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah mengurangi beban TPA secara drastis, mengoptimalkan daur ulang, dan mewujudkan kota berbudaya lingkungan. Inovasi ini merefleksikan pengakuan bahwa masalah sampah menuntut kolaborasi masif dan perubahan perilaku kolektif, sejalan dengan prinsip *zero*

waste dan *circular economy* (sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi).

Program Respata juga berkontribusi dalam pencapaian target nasional pengelolaan sampah sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Melalui Respata, Kota Surakarta berupaya mewujudkan target tersebut di tingkat daerah dengan pendekatan lokal yang adaptif dan partisipatif. Program ini membangun kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, lomba lingkungan, serta pelatihan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada kebersihan kota, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat yang berbudaya lingkungan.

Namun demikian, implementasi program Respata tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah keberagaman tingkat kesadaran masyarakat di tiap wilayah kelurahan. Beberapa warga masih menganggap kegiatan memilah sampah sebagai sesuatu yang merepotkan dan tidak memberikan manfaat langsung. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperkuat strategi komunikasi publik dan insentif, seperti pemberian penghargaan kepada kelurahan terbersih, pengembangan bank sampah digital, serta integrasi kegiatan Respata dengan program kebersihan lain seperti Jumat Bersih dan Kampung Iklim. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan program.

Program Resik-Resik Pilah Sampah Kota Surakarta (Respata) bukan sekadar proyek, melainkan sebuah lompatan inovasi tata kelola pemerintahan yang berfokus pada perubahan budaya. Program ini mengakui bahwa teknologi

dan regulasi hanyalah alat; kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi multi-pihak dan kesadaran kolektif masyarakat (RBTv, 2025). Dengan dukungan penuh dari struktur kewilayahan (Babinsa dan Bhabinkamtibmas), Respata diproyeksikan menjadi model pengelolaan sampah yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi krisis lingkungan lokal, tetapi juga menjadi cetak biru bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan mandiri energi. Inovasi ini adalah langkah nyata Pemerintah Kota Surakarta dalam merealisasikan visi kota modern yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi dan inovasi Program Resik-Resik Pilah Sampah Kota Surakarta (Respata) dari perspektif Dynamic Governance (Neo & Chen). Pendekatan ini dipilih untuk mengungkapkan realitas sosial serta faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi para aktor dalam proses transformasi kebijakan. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, meliputi pejabat DLH, aparat kewilayahan (Babinsa/Bhabinkamtibmas), dan perwakilan masyarakat (Ketua RT/RW/warga aktif), dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam di lokasi permukiman dan dokumentasi laporan program. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber dan metode. Data dianalisis secara sistematis (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan) dengan mengacu pada kerangka berpikir William N. Dunn, menghasilkan gambaran utuh mengenai kendala struktural, teknis, dan sosial dalam pelaksanaan Respata.

PEMBAHASAN

Inovasi Respata Pemerintah Kota Surakarta mentransformasi pengelolaan sampah dari pendekatan akhir menjadi pemilahan wajib di

sumber berbasis partisipasi dan kolaborasi lintas sektor (Pemerintah, Masyarakat, TNI). Untuk menilai efektivitasnya, digunakan kerangka Dynamic Governance (Neo & Chen, 2007), yang relevan karena Respata mengakui sampah adalah masalah perilaku dan tata kelola. Kerangka ini menilai tiga kapabilitas Respata: Thinking Ahead (antisipasi strategis), Thinking Again (koreksi kebijakan), dan Thinking Across (kolaborasi lintas sektor). Respata adalah inovasi kebijakan proses fundamental yang merencanakan ulang tata kelola persampahan, mengubah birokrasi menjadi entitas adaptif dan proaktif.

1. *Thinking Ahead* (Visi Strategis dan Antisipasi Krisis Lingkungan)

Program Respata mewujudkan kapabilitas Pilar *Thinking Ahead* (Dynamic Governance), membuktikan kesiapan Pemerintah Kota Surakarta untuk bersikap visioner dan antisipatif. Lahir dari pengakuan kritis terhadap ancaman eksistensial TPA Putri Cempo dan kegagalan model reaktif (mencari TPA baru), Respata secara radikal menggeser fokus dari hilir (TPA) ke hulu (sumber sampah). Respata dirancang sebagai solusi prediktif yang menargetkan pengurangan signifikan volume sampah harian, berfungsi sebagai strategi konservasi usia TPA dan mengubah fungsinya menjadi fasilitas pemrosesan residu. Strategi *Thinking Ahead* ini dilakukan melalui:

a. Mengamankan Masa Depan TPA dan Integrasi Infrastruktur Energi

Visi strategis *Thinking Ahead* dalam Respata diperkuat melalui integrasi yang erat dengan proyek infrastruktur energi berkelanjutan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Pemerintah Surakarta memastikan bahwa sistem pemilahan wajib di hulu berfungsi sebagai filter kualitas bahan baku (feedstock) untuk PLTSA. Sampah yang telah dipilah dan diverifikasi di tingkat rumah tangga akan menghasilkan residu yang minim potensi lindi, serta memiliki komposisi yang lebih optimal untuk diolah. Pemisahan komponen organik dan

anorganik di sumber memungkinkan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk didaur ulang melalui Bank Sampah, sementara residu yang tersisa menjadi bahan bakar yang lebih efisien bagi PLTSa.

Pendekatan terpadu ini menunjukkan kapabilitas *Dynamic Governance* untuk melihat masalah lingkungan dan energi secara holistik. Respata memecah silo birokrasi antara pengelolaan lingkungan dan infrastruktur energi. Keberhasilan Respata dalam memastikan disiplin pemilahan akan memastikan efisiensi dan kelayakan ekonomi PLTSa yang sangat tergantung pada pasokan bahan baku yang konsisten dan berkualitas. Oleh karena itu, *Thinking Ahead* di sini berarti: *tidak hanya mengurangi masalah, tetapi mengubah masalah menjadi solusi energi*, yang merupakan langkah maju signifikan menuju visi *smart sustainable city*.

b. Penguatan Regulasi yang Prediktif dan Mentransfer Tanggung Jawab

Dimensi kedua dari *Thinking Ahead* diwujudkan melalui penguatan kerangka regulasi daerah yang bersifat prediktif. Peluncuran dan keberlanjutan Respata didukung oleh pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah. Perda ini adalah instrumen utama yang secara tegas mengalihkan tanggung jawab pengelolaan sampah dari beban tunggal pemerintah menjadi tanggung jawab bersama yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat melalui mekanisme pemilahan wajib. Penguatan regulasi ini merupakan langkah strategis untuk menekan timbulan sampah sejak dari unit rumah tangga, tempat asal masalah. Dengan menetapkan pemilahan sebagai kewajiban hukum bukan lagi sekadar kampanye atau imbauan persuasive Pemerintah Kota Surakarta secara proaktif mengadopsi mandat yang mengikat untuk mendorong perubahan perilaku sosial secara masif. Ini adalah tindakan *prediktif* karena mencegah eskalasi krisis sampah di masa depan.

2. *Thinking Again* (Refleksi dan Koreksi Kebijakan sebagai Inti Inovasi)

Kapabilitas Pilar *Thinking Again* dalam kerangka *Dynamic Governance* merupakan fondasi filosofis terpenting di balik lahirnya Program Respata. Pilar ini menuntut birokrasi Pemerintah Kota Surakarta untuk secara mandiri dan terus-menerus mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan, berani mengidentifikasi kegagalan, dan mengambil langkah reformasi atau koreksi radikal terhadap praktik yang terbukti tidak efektif. Dalam konteks pengelolaan sampah,

a. Mengakui Kegagalan Model Sukarela:

Thinking Again ini diawali dengan pengakuan institusional terhadap kegagalan model sukarela yang selama ini dominan. Penelitian dan data empiris terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa inisiatif 3R yang bersifat *voluntary*, seperti program Bank Sampah, meskipun efektif dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan insentif ekonomi pada kantong-kantong komunitas tertentu, gagal mencapai jangkauan dan disiplin universal di seluruh rumah tangga Surakarta. Program-program lama tidak berhasil mengubah perilaku masyarakat secara fundamental, hanya menyentuh permukaan masalah sementara timbulan sampah terus melonjak.

Respata adalah respons langsung dan korektif terhadap kelemahan sistemik ini. Proses *Thinking Again* ini mendorong Pemerintah Kota Surakarta menyimpulkan bahwa mekanisme yang bersifat *voluntary* harus ditinggalkan sebagai strategi utama dan diganti dengan mekanisme *enforcement* (penegakan) yang lebih ketat, didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, meskipun penegakan tersebut harus dikemas secara persuasif dan berkelanjutan. Pengakuan terhadap kegagalan model lama ini menunjukkan kedewasaan birokrasi dalam menerima umpan balik negatif dan menggunakan kegagalan tersebut sebagai basis data untuk inovasi yang lebih efektif. Ini adalah langkah *meta-cognition* dalam tata kelola kemampuan untuk berpikir tentang cara berpikir mereka sendiri. Oleh karena itu, *Thinking Again* bukanlah sekadar penyesuaian teknis, melainkan reformasi filosofis yang mengubah dasar implementasi kebijakan dari

pemberdayaan pasif menjadi *kewajiban aktif* yang secara ilmiah dan terukur, bukan sekadar terikat pada sistem kota. reformasi permukaan.

b. Transformasi dari Imbauan menjadi Kewajiban yang Berkonsekuensi

Koreksi paling signifikan dari proses *Thinking Again* adalah transformasi tegas dari imbauan menjadi kewajiban berkonsekuensi, didorong oleh *political will* yang kuat. Pemerintah Surakarta mengambil langkah radikal dengan menerapkan sanksi sosial yang berdampak besar: sampah yang tidak dipilah, tidak diangkut. Sanksi ini menjadi disinsentif langsung untuk mengubah kebiasaan membuang sampah campur. Proses koreksi ini mendorong reformasi kultural dan sistemik, melampaui fokus teknis semata. Dengan menjadikan pemilahan sebagai syarat pengangkutan, Respata secara efektif memaksa seluruh sistem (warga dan petugas) untuk mematuhi praktik pemilahan, mengubah layanan publik menjadi bersyarat. Keputusan ini memastikan sumber daya dialihkan untuk memproses sampah yang sudah terpilah dan bernilai, menciptakan efisiensi yang lahir dari disiplin kolekti

c. Pemusatan Fokus pada Hulu dan Koreksi Prioritas Sampah Organik

Koreksi kebijakan dalam *Thinking Again* turut memusatkan fokus pada sampah organik di sumber. Pemerintah Kota Surakarta menyadari bahwa kegagalan inisiatif 3R sebelumnya disebabkan fokus berlebihan pada aspek ekonomi anorganik (Bank Sampah), mengabaikan sampah organik yang merupakan mayoritas volume (50-60%) dan sumber lindi utama. Melalui Respata, koreksi prioritas ini menghasilkan kewajiban pemilahan sampah organik. Langkah ini strategis untuk: 1) Mengurangi volume instan melalui pengomposan atau pakan ternak di tingkat komunal, dan 2) Meningkatkan kualitas lingkungan TPA dengan meminimalkan produksi lindi dan gas metana berbahaya. Ini membuktikan bahwa *Thinking Again* di Surakarta berorientasi pada penyelesaian akar masalah lingkungan

3. Thinking Across (Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Jantung Inovasi Respata)

Kapabilitas Pilar *Thinking Across* merupakan inti sekaligus keunikan utama dari inovasi Program Respata. Pilar ini menekankan perlunya kolaborasi, pembelajaran, dan integrasi yang melintasi batas-batas birokrasi dan sektor tradisional untuk mencapai tujuan publik yang kompleks, terutama yang melibatkan perubahan perilaku sosial secara masif. Pemerintah Kota Surakarta secara visioner menyadari bahwa masalah disiplin pemilahan sampah adalah masalah kelembagaan dan penegakan sosial, bukan semata-mata masalah teknis persampahan yang menjadi domain tunggal Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Realisasi inilah yang mendorong lahirnya Inovasi Pentaheliks yang radikal dengan pelibatan formal Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam program lingkungan hidup.

Inovasi Pentaheliks

Secara tradisional, aparat keamanan dan kewilayahan ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan urusan teknis pengelolaan lingkungan. Namun, dalam konteks Respata, pelibatan mereka menunjukkan pemahaman mendalam tentang *governance* yang adaptif. Babinsa dan Bhabinkamtibmas diintegrasikan ke dalam rantai implementasi Respata, berfungsi ganda: Pertama, sebagai Agen Sosialisasi yang kredibel dan efektif. Dengan memanfaatkan struktur kewilayahan mereka yang telah *established* dan memiliki hubungan interpersonal yang kuat di tingkat RT/RW, mereka mampu menyampaikan pesan pemilahan secara langsung, berulang, dan personal kepada setiap rumah tangga, mengatasi kelemahan jangkauan komunikasi DLH. Kedua, mereka bertindak sebagai Pengawal Kedisiplinan. Otoritas kelembagaan mereka digunakan untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap mandat

pemilahan. Kehadiran mereka menambahkan unsur *force* (disiplin) yang lunak namun tegas, yang esensial untuk mematahkan kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah campur.

b. Memanfaatkan Sumber Daya Non-Tradisional dan *Multiplier Effect* Kelembagaan

Pilar Thinking Across berfokus pada memobilisasi sumber daya non-tradisional untuk mengatasi keterbatasan SDM dan anggaran DLH. Secara cerdas, Pemerintah Surakarta memanfaatkan otoritas dan jangkauan sosial-teritorial TNI/Polri (Babinsa/Bhabinkamtibmas) sebagai aset siap pakai, menghindari rekrutmen mahal. Keterlibatan aparat keamanan menciptakan efek *multiplier* yang menjamin implementasi Respata masif, seragam, dan cepat di seluruh wilayah tanpa investasi birokrasi baru. Pemanfaatan aset kelembagaan ini adalah solusi cerdas dan hemat biaya untuk mengatasi masalah perilaku publik. Karena ketidakdisiplinan memerlukan unsur penegakan sosial, kapabilitas ini lebih efektif diemban oleh sektor keamanan daripada sektor sipil. Hal ini membuktikan bahwa Dynamic Governance menekankan fleksibilitas alokasi fungsi berdasarkan kapabilitas kelembagaan yang paling efektif, memastikan tantangan perubahan perilaku diatasi melalui kombinasi pendekatan persuasif dan otoritas yang terpadu.

c. Integrasi Horizontal dan Vertikal dalam Tata Kelola Terpadu

Pilar Thinking Across membentuk struktur tata kelola yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal. Horizontal, Respata menyelaraskan fungsi antar-instansi (DLH, TNI, Polri) melalui mekanisme koordinasi formal. Vertikal, program ini menghubungkan keputusan strategis Pemerintah Kota hingga ke tingkat RT/RW melalui rantai komando aparat kewilayahan. Integrasi ganda ini memastikan tidak ada celah implementasi dan menetapkan akuntabilitas di setiap tingkatan. Hasilnya, Respata menjadi model tata kelola terpadu yang memecahkan masalah lingkungan kompleks melalui inovasi

Kesimpulan

Program Respata merupakan model Inovasi Tata Kelola Dinamis (*Dynamic Governance*) yang berhasil mentransformasi pengelolaan sampah di Surakarta dari model reaktif menjadi proaktif dan terintegrasi. Inovasi ini didasarkan pada tiga pilar utama:

1. *Thinking Ahead*: Strategi visioner untuk mengamankan usia TPA dan mengintegrasikan sampah bersih dengan infrastruktur energi (PLTSa), didukung regulasi pemilahan wajib yang prediktif.
2. *Thinking Again*: Koreksi kebijakan radikal dengan mengganti mekanisme sukarela 3R menjadi mekanisme penegakan disiplin yang berkonsekuensi, serta memfokuskan penanganan pada sampah organik sebagai akar masalah.
3. *Thinking Across*: Kolaborasi Pentaheliks inovatif yang melibatkan TNI/Polri (Babinsa/Bhabinkamtibmas) sebagai agen pendamping dan penegak disiplin di tingkat RT/RW, mengatasi keterbatasan SDM DLH dan menjamin implementasi yang masif dan seragam.

Daftar Pustaka

- Ayuningtyas, Tiara Kusuma, dan Wahyu Nurharjadmo. (2021). "Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 7(1), 14–29. doi: 10.31947/jakpp.v7i1.10668. (Disebutkan terkait *political will* dan PLTSa)
- Indarmawan, R.S & Amin, C. (2020). *Kajian Peran Pemulung dalam Pengurangan Volume Sampah di TPA Putri Cempo Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Jurnal Bengawan Solo. (2024). Urgensi Reduksi Sampah Organik Sebelum Dibuang Ke TPA dalam Kerangka Ekonomi Sirkular di Kota Surakarta. Vol. 3 No. 2.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. (2021). Disfungsi Pengaturan Sampah untuk Mewujudkan Konsep Zero Waste di Kota Surakarta (Studi atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah). Vol. 6 No. 2. Universitas Sebelas Maret.
- Jurnal Implementasi Kebijakan. (2022). "Analisis Implementasi Kebijakan Inovasi Pengelolaan Sampah di Daerah."
- Jurnal Transformasi Pengelolaan. (2025). "Transformasi Pengelolaan Sampah Melalui Kebijakan Publik Yang Adaptif Dan Berkelanjutan Di Kota Surakarta."
- KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). (2019). Data Komposisi Sampah Nasional.
- Neo, Boon Siong, dan Geraldine Chen. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Innovation, Resilience, and Growth in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. (Dijadikan kerangka teori utama *Dynamic Governance*).
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022. *Tentang Pengelolaan Sampah*. Pemerintah Kota Surakarta
- RBTv. (2025). Cara Solo Tangani Sampah dengan Memilah. *Kabar Jogja RBTv* (Berita Online, diakses untuk program Respata dan kolaborasi TNI-Polri).
- Supratikno, S.I. (2023). Model Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Surakarta. Tesis. Universitas Terbuka.
- Suriyanti, Dwi. (2021). "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Surakarta." *Jurnal Administrasi Publik*.
- Suriyanti. (2021). Model Ideal Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Konsep Zero Waste di Kota Surakarta. Tesis. Universitas Sebelas Maret.